

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN  
DI ERA OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN KOTA  
PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**T E S I S**

**Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



**Oleh :**

**SAYUR MATUA B HARAHAP  
NPM. 081801094**

**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**M E D A N**

**2 0 1 0**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF GOVERNMENTAL PERFORMANCE IN SUB-DISTRICT IN THE REGIONAL AUTONOMY ERA AT KOTA PINANG, SOUTH LABUHANBATU REGENCY, NORTH SUMATERA PROVINCE**

**Name : Sayur Matua B Harahap, Reg. No. 081801094**

*South Labuhanbatu regency is formed based on Act No 22 of 2008 and it is as the extension area from Labuhanbatu regency. Based on the Rules of Regent No 5 of 2009 concerning with the arrangement on the structural organization and working order of sub-district government, the government of South Labuhanbatu regency establishes the forming of 7 (seven) sub-districts in the South Labuhanbatu Regency. One of the sub-districts formed is Kota Pinang sub-district. It is expected that the forming of the new sub-district will able to implement the tasks and functions in giving the service for the society. Hence, there are some aspects to prepare namely human resources, financial sector, facilities and infrastructures.*

*This research is intended to know the governmental performance in sub-district in the regional autonomy era at Kota Pinang sub-district, South Labuhan Batu regency. The method used is descriptive research with the data taken from the interview. The informants are the officers in the sub-district, head of village, member of regional development and the community. The analysis of data is conducted using qualitative descriptive analysis.*

*The result of the research shows that after the regional autonomy due to the routine budget and the development of sub-district in Kota Pinang, all still depend on the Regional Income Budget of regency. In the technology mastery, to add the quality of service given, the ability of the officers should be increased. Mostly, the officers do not able to operate the computer and information technology. Thus, the readiness of the governmental officers should be added due to the progress of development. With the regional autonomy, it increases the role of the government of Kota Pinang sub-district. It is seen that previously, it was as the administrative area and it changes into Regional Officers with working area and as the facilitator for the development in its region. Additional authority is also given by the regency to manage the works which is later delegated to the sub-district. The success level achieved by Kota Pinang sub-district is categorized good since the realization of the target for 93,5% can be achieved. In general, the result of the program or the policy to be done by Kota Pinang sub-district may fulfill the needs and aspiration of the people. However, it can not achieve all aspects because of the limited availability of fund. Consequently, the program is done according to the priority.*

**Key words :** *governmental performance, sub-district government, regional autonomy.*

# ABSTRAK

## ANALISIS KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI ERA OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN KOTA PINANG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

N a m a : Sayur Matua B Harahap, NPM : 081801094

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Kecamatan, maka berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan pembentukan 7 (tujuh) kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, salah satu kecamatan yang dibentuk adalah Kecamatan Kota Pinang yang diharapkan dapat sebagai perpanjangan tangan Pemerintahan kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana.

Penelitian ini bertujuan untuk Kinerja Pemerintahan Kecamatan di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan merupakan penelitian deskriptif dengan sumberdata diperoleh melalui wawancara. Informan diambil berasal dari perangkat pemerintahan kecamatan, kepala desa, anggota BPD dan masyarakat. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya otonomi daerah, dalam membiayai anggaran rutin dan pembangunan Kecamatan Kota Pinang seluruhnya masih tergantung dari APBD Kabupaten. Dalam penguasaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan seperti pada saat sekarang ini, tingkat kemampuan aparat Kecamatan Kota Pinang masih perlu ditingkatkan. Kebanyakan dari pegawai yang ada masih belum menguasai komputer dan teknologi informasi. Dengan demikian kesiapan SDM Kecamatan Kota Pinang masih perlu terus diupayakan seiring kemajuan jaman. Dengan adanya otonomi daerah, telah meningkatkan peran Pemerintah Kecamatan Kota Pinang, karena Kecamatan yang dulu merupakan wilayah administratif kini telah berubah menjadi Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di daerahnya, serta telah diberikan tambahan kewenangan dari Kabupaten untuk mengurus beberapa hal yang didelegasikan kepada Kecamatan. Tingkat keberhasilan pencapaian program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Pinang sudah cukup baik, karena realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kota Pinang adalah 93,5 % dari target yang ingin dicapai. Secara umum hasil-hasil dari program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kota Pinang dapat memenuhi kebutuhan atau aspirasi warga masyarakat. Namun secara menyeluruh, masih belum dapat karena keterbatasan anggaran yang ada, sehingga program dilaksanakan secara prioritas.

Kata kunci : kinerja pemerintahan, pemerintah kecamatan, otonomi daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “ **Analisis Kinerja Pemerintahan Kecamatan Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara**”. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. M. Yacob Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur Program Pascasarjana UMA,
3. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi MAP, sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan saran-sarannya.
4. Bapak Warjio, SS, MA, Sekretaris Program Studi MAP, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran-sarannya.
5. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan beserta staf atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

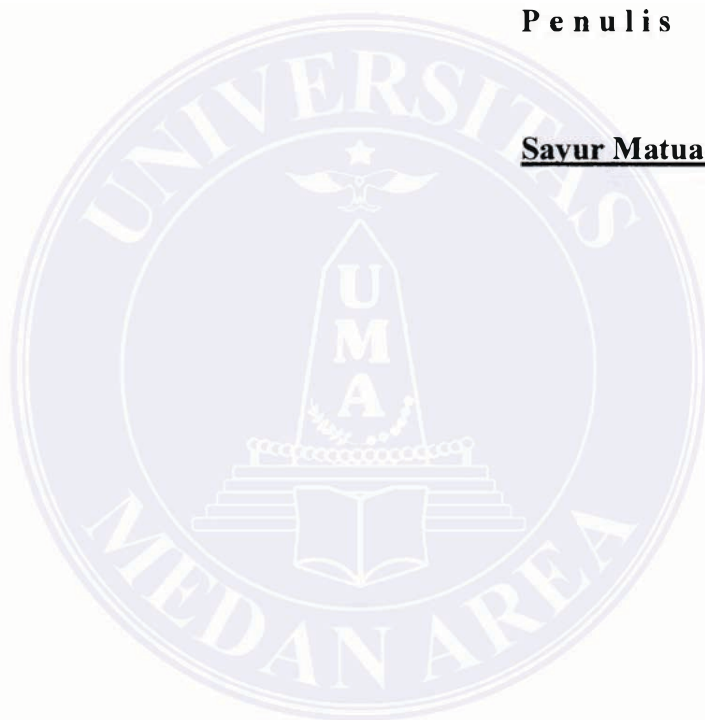
7. Terimakasih pula buat Istri Tercinta dan anak-anakku tersayang serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, 17 April 2010

**P e n u l i s**

**Sayur Matua B. Harahap**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan dan pembatasan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Konsep Otonomi Daerah. ....	7
2.2. Konsep Kinerja .....	12
2.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan .....	23
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2. Sumber Data Dan Teknik Pemilihan Informan .....	32
3.2.1. Metode Pengumpulan Data .....	23
3.2.2. Validasi Data .....	34
3.2.3. Sasaran Penelitian .....	35
3.2.4. Fokus Penelitian .....	36
3.2.5. Lokasi Penelitian .....	36
3.2.6. Analisa Data .....	37
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Keadaan Geografis.....	40
4.2. Pemerintahan .....	41
4.3. Keadaan Demografis .....	42
4.4. Keadaan Sosial Budaya .....	43
4.5. Keadaan Sosial Ekonomi .....	44

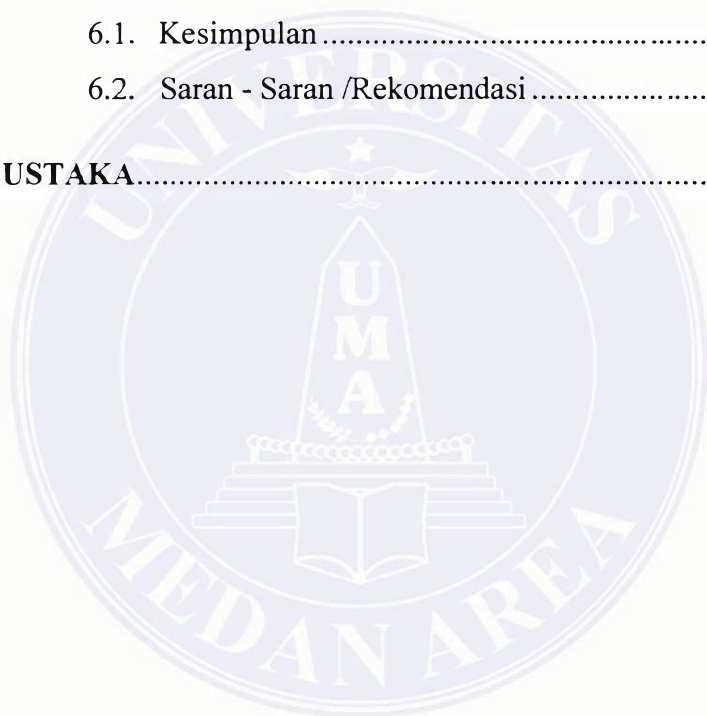
**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA**

5.1. Hasil Penelitian.....	46
A. Aspek Masukan .....	48
B. Aspek Proses... ..	58
C. Aspek Keluaran .....	65
D. Aspek Hasil .....	70
E. Aspek Manfaat .....	74
F. ....	

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	82
6.2. Saran - Saran /Rekomendasi.....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
----------------------------	-----------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Implementasi kebijakan otonomi daerah yang berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menyebabkan terjadinya perubahan baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah Provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini mengenal pula adanya tiga macam kewenangan, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi dimaksudkan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom, dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan / atau perangkat pusat di daerah, adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemberian otonomi kepada daerah kabupaten / kota didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab,



menyebabkan semua bidang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Demikian juga dalam mengatur penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan pada saat ini sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Pemerintahan kabupaten.

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adanya kewenangan urusan Pemerintahan daerah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah namun sekaligus merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Adanya keleluasaan kewenangan yang diberikan kepada setiap daerah otonom menuntut dilakukan penataan kelembagaan Pemerintahan, termasuk kelembagaan Pemerintahan kecamatan. Hal ini penting karena kecamatan telah berubah status dari lingkungan administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten / kota, serta perubahan fungsi utama pemerintah daerah yang semula sebagai promotor pembangunan menjadi fasilitator dan pelayanan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Asrori, B.S., 2000, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi kemampuan Untuk Melaksanakan Otonom Daerah di Yogyakarta*, Tesis MAP UGM, Yogyakarta, ( Tidak Dipublikasikan ).
- Bratakusumah, D.S. dan D. Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Darumurti, K.D. dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah , Kemarin, Hari ini, dan Esok*, Kritis, Vol. XII No. 3. 1-53.
- Faustino Cardoso Gomes , 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta
- I. Gusti Ngurah Agung, 1992, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta
- Kaho, YR, 2001, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kakisina, Stephen, dan Rumansara, 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahan Sebagai Tuntutan Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Berkeadilan*, Kritis, vol XII no 3
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Koeswara, 2000, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Analisis CSIS No. I Tahun XXIX
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, 1992 *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta LP3ES.
- Moleong, Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung

- Sadu Wasistiono , 2002, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Citra Pindo, Bandung
- Slamet Soekarno, 2009, *Otonomi Daerah Di Kabupaten Kapuas*, Tesis MAP UGM ( tidak dipublikasikan)
- Smith, BC, 1985, *Decentralization;The Territorial Dimension Of The State*, Gerge Allen& Unwin, London
- Sumodiningrat, G , 1996, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT Biena pena pariwisata, Jakarta
- Sugiono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung
- Syamsuddin Haris, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, P2P-LIPI, Jakarta
- Thoha, M, 1985, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, Dalam PRISMA , LP3ES, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Utomo, Warsito, 1997, *Pemberdayaan Birokrasi*, makalah seminar FISIPOL UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
- Wajong, J, 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, Ikhtiar, Jakarta
- Widodo , Erna dan Mukhtar, 2000, *Kontruksi Ke arah Penelitian Deskriptif*, Avyrruuz, Yogyakarta
- Zuhro, 1999, *Masa Depan Otonomi Daerah*, Jurnal Otonomi, Volume I Oktober 1999.